



Revised: Juni 2025	Accepted: Juli 2025	Published: Agustus 2025
-----------------------	------------------------	----------------------------

Peran Strategis Umat Islam Indonesia: Refleksi dari Sudut Pandang Partisipan tentang Reformasi, Politisasi Agama, dan Sekularisasi

Nuraini A. Manan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Gmail: nony.aceh63gmail.com

Abstract

This research examines the strategic role of Muslims in Indonesia in the context of reform, religious politicization and secularization. With a participatory approach, this study explores participants' views on these three main issues and their impact on social and political life in Indonesia. This research finds that reform in Indonesia must rely on Islamic principles which emphasize continuous evolution and maintaining good traditions while adopting new and better things. The politicization of religion is identified as a crucial problem that threatens the sacredness of religion, resulting in desecralization and potential social conflict. On the other hand, misunderstood secularization can also pose challenges to the integration of religious values in everyday life. This study concludes that a balance between religious values and modern developments is very important for the progress of Muslims and the Indonesian nation as a whole.

Keyword: *Reformation, the Politicization of Religion, and Secularization.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategis umat Islam di Indonesia dalam konteks reformasi, politisasi agama, dan sekularisasi. Dengan pendekatan partisipatif, studi ini mengeksplorasi pandangan partisipan terhadap tiga isu utama tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa reformasi di Indonesia harus bersandar pada prinsip-prinsip keislaman yang menekankan evolusi terus-menerus dan pemeliharaan tradisi yang baik sambil mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik. Politisasi agama diidentifikasi sebagai masalah krusial yang mengancam kesakralan agama, mengakibatkan desakralisasi dan potensi konflik sosial. Di sisi lain, sekularisasi yang salah dimengerti juga dapat menimbulkan tantangan bagi integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan perkembangan modern sangat penting untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Reformasi, Politisasi Agama, dan Sekularisasi.*

Pendahuluan

Manusia mempunyai peranan strategis di muka bumi ini. Baik buruknya kondisi kehidupan di dunia ditentukan oleh konsistensi manusia dalam melakukan segala aktivitas

positif. Dalam kaitan ini, manusia merupakan faktor penting bagi terciptanya keseimbangan dunia. Sebagaimana firman Allah, Ingatlah ketika Tuhanmu berabda kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (QS Al-Baqarah [2]: 30).¹ Dan juga, Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda- benda) seluruhnya (QS Al-Baqarah [2]: 31).²

Yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah manusia. Sedangkan kata asma (nama) dalam ayat berikutnya adalah nilai-nilai universal. Maksudnya, Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi sebagai "manifestasi" wujud Allah Swt. yang absolut. Dan, manusia berkewajiban mengembangkan asma atau nilai-nilai-Nya. Di antara nilai-nilai Allah Swt. di atas permukaan bumi adalah gugusan para makhluk yang ber sifat plural. Dari jenis makhluk yang bernama manusia saja, Allah membuatnya dalam berbagai etnis, suku, bangsa, bahasa, status sosial, dll. Dan itu adalah manifestasi Allah SWT. sebagai Tuhan semesta alam (Rabbul-'alamin).

Allah Swt. tidak menjadikan komunitas manusia ini dalam satu kondisi yang seragam. Oleh karena itu, ada beragam suku, ras, agama, bahasa, dan kultur dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian, dari kondisi yang heterogen itu akan tercipta kehidupan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt.:

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya (yakni keragaman dan kemajemukan itu) kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. (QS Al-Ma'idah [5]: 48).”³

Sebuah komunitas yang terbentuk di tengah-tengah kehidupan manusia tidak boleh mengingkari esensi kemanusiaan pada diri sese- orang. Seseorang yang hidup di tengah masyarakat harus dijamin dan diakui esensi kemanusiaannya. Begitu juga seseorang yang hidup dalam sebuah bangsa, juga tidak boleh dikebiri nilai kemanusiaannya. Maka, dalam kehidupan berdemokrasi, umat Islam harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini. Salah satu esensi kemanusiaan yang terpenting dalam berdemokrasi adalah pengakuan atas eksistensi kemajemukan dan keragaman.⁴

Apabila menengok sejarah panjang umat manusia, kita dapat belajar kepada Nabi Muhammad Saw. yang tidak pernah melakukan pemaksaan atas keragaman ideologi dan agama dalam lingkungan masyarakat Madinah. Demikian pula kita dapat meneladani para Wali Songo di Jawa yang sangat menghargai budaya lokal. Deretan tokoh besar itu telah berhasil mencapai pemahaman yang sempurna tentang hakikat kehidupan manusia di dunia ini. Rumusan tentang peran umat Islam dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan itu perlu diperjelas.

¹ *Tarikh Khulafa-Syarah Para Khalifah-Imam as-Suyuthi-Qisthi Press*, ISBN; 978-978-1303-69-9. hlm: 119.

² *Islam and Lokal Wisdom, Religious Expression in Sotheast Asia* (Supriyanto, Dkk). Cet April 2017. ISBN 978-602-401-867-2. Hlm; 26-30.

³ *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Zuhairi Nisrawi Thn 2009. ISBN/ ISSN 978-979-709-450-8.

⁴ *Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia-*, Journal UWKS <https://journal.uwks.ac.id.pdf> Oleh S. Marbun Thn 2023.

Di sini ada satu hal yang perlu ditekankan terlebih dahulu, yakni berkaitan dengan kata Islam itu sendiri. Kata "Islam" patut dipahami maknanya secara luas. Disebut 8 (delapan) kali dalam Al-Quran, tetapi sering terdistorsi dari makna sesungguhnya. Misalnya dalam memahaminya firman Allah "Innaddina 'indallah al-Islam" (QS Ali Imran [3]:5-19).⁵ Ayat ini sering dipahami sebagai formalisasi Islam dalam bentuk kelembagaan dan organisasi. Yakni, bahwa seorang penganut Islam adalah orang yang ber-KTP Islam, memakai serban serbaputih, dan sebagainya. Sementara, kelompok yang tidak menunjukkan identitas Islam dianggap "kafir".

Pemahaman seperti ini hanya melihat sisi luar atau kulitnya Islam. Sementara esensi, substansi, serta makna-makna esoterisnya sama sekali tidak disentuh. Hakikat Islam adalah penyerahan makhluk secara total kepada Allah Sang Khalik tanpa reserve. Bisa jadi orang yang mengaku tidak memiliki identitas Islam, tetapi dirinya benar-benar ber-Islam. Maka, benar apa yang diungkap sufi agung dari Andalusia, Al-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn 'Arabi (w. 638 H), yang menyatakan dengan tegas bahwa kemajemukan fenomena alam semesta pada hakikatnya merupakan tajalli atau penampakan asma-asma dan sifat-sifat Tuhan yang amat indah. Tak satu pun realitas di muka bumi ini yang terlepas dari upaya penyerahan diri makhluk kepada Sang Khalik. Mereka semua bertasbih untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Nya.

Benar, Islam sebagai ajaran ilahiah haruslah diaplikasikan ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial-politik. Namun demikian, yang harus dihindari adalah formalisasi atau institusionalisasi itu sendiri. Formalisasi atau institusionalisasi Islam dalam tata pemerintahan justru akan memperburuk citra Islam dan akan menjadikannya sebagai ajaran yang sempit dan membahayakan.

Betapa banyak para penguasa tergelincir menjadi otoriter dengan dalih agama. Dengan demikian, agama identik dengan pengertian konstruksi pertama, yakni sebagai alat memaksa. Padahal konstruksi pertama hanya berhak dimiliki Allah. Demikian pula yang dilakukan sekte Khawarij yang membantai lawan politik mereka dengan dalih agama. Juga Yazid ibn Mu'awiyah yang membantai ahlul bait atau keluarga keturunan Nabi Saw. di Padang Karbala, Irak, dengan dalih agama Islam pula. Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, panglima perang Bani Umayyah, menebas leher sekitar tujuh puluh ribu warga Irak dengan bangga, juga mengatasnamakan Islam.⁶ Demikian seterusnya, dengan sekian cerita kelam dari orang-orang yang membenarkan kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, wajar jika kemudian Nabi Saw. justru menampakkan citra Islam yang lebih damai dan fungsional melalui pembentukan pemerintahan di bawah panji "Piagam Madinah", sesuai dengan prinsip rahmatan lil-'alamin.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan reflektif-kualitatif berbasis partisipasi. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan-pandangan partisipan yang terdiri dari

⁵ *Konsistensi Pahalatul Ulama dalam Mempertahankan Pancasila dan kedaulatan Negara Kesatuan.* Jurnal UIN Wali Songo. <http://journal.walisongo.ac.id/pdf.2019> Universitas Wali Songo Semarang Indonesia. Penulis: Amin Farid.

⁶ *Islam Tuhan, Islam manusia.* Haidar Bagir. Pengantar; Ahmad Syafi'i Ma'arif- Al- Mizan, 2011.

⁷ Abu Dzar al-Ghifari, <https://an-nur.ac.id/>, 16 November 2022.

akademisi, praktisi sosial, dan pemuka agama. Sumber data utama diperoleh dari hasil refleksi, observasi sosial, dan kajian literatur yang mendalam terhadap realitas politik dan keagamaan umat Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Umat Islam Indonesia: Pasang Surut Partisipasi

Indonesia termasuk negara atau bangsa yang majemuk. Saya yakin, di atas muka bumi ini hanya Indonesia yang dikaruniai Allah Swt. sebagai sebuah bangsa yang mempunyai ratusan suku, sub-etnik, bahasa, tradisi, dan budaya. Keragaman tersebut bukanlah tragedi, melainkan sebuah potensi yang dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kehidupan yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Demokrasi merupakan salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan untuk mengimplementasikan nilai pluralisme.⁸ Dengan demikian, umat Islam semakin cerdas dalam memahami nilai agamanya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan, umat Islam bisa lebih percaya diri dalam menempatkan dirinya di tengah sistem kehidupan tanpa harus menanggalkan nilai-nilai keagamaannya.

Oleh karena itu, dalam berdemokrasi⁹ yang baik, umat Islam tidak perlu mencederai nilai-nilai agama. Sebaliknya, umat Islam membutuhkan upaya eksplorasi nilai-nilai keagamaan untuk diwujudkan dalam perilaku dan tata nilai berdemokrasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah aplikatif:

1. Memahami orang lain (*ruh at-ta'addudiyyah*). Keragaman manusia bukanlah petaka. Maka, keragaman Indonesia merupakan potensi. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut perlu kesadaran rakyat negeri ini untuk saling mengenal dan memahami orang lain di sekitarnya. Seperti diungkap dalam Al-Quran: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. (ta'aruf) (QS Al-Hujurat [49]: 13).¹⁰
2. Mengembangkan dan melestarikan tradisi (*ruh al-wathaniyyah*). Memahami bahwa negeri ini kaya akan tradisi, menghormati budaya sendiri dan melestarikannya merupakan upaya menanamkan sikap kebangsaan yang kuat terhadap diri sendiri. Dengan demikian, tercipta suatu identitas individu/komunitas yang dapat melahirkan karakter sebuah bangsa.
3. Menjaga komitmen kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara (*ruh al-insaniyyah*).

Komitmen menjaga esensi kemanusiaan dalam berbangsa dan negara di tengah realitas kemajemukan. Maka, kita perlu menyadari bahwa seseorang tidak mungkin dapat melangkah sendirian tanpa orang lain. Semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Komitmen berbangsa

⁸ Gifari Zakawali, *Mengenal Perang Jamal dan Perkembangan Sejarah Islam*, 2023.

⁹ Reza Kurnia Darmawan/kompas, *Sejarah Kerajaan Majapahit: Awal Mula Berdiri hingga Keruntuhan*, 2022.

¹⁰ Studi Islam di Barat: Cita, Fakta, Ciri dan Cara. <https://staiindojkt.ac.id/blog/2019/09/05/studi-islam-di-barat-cita-fakta-ciri-dan-cara/>. Di akses 5 Januari 2024.

dan bernegara berarti komitmen untuk tidak melakukan penindasan, diskriminasi, serta aksi kejahatan lainnya terhadap kelompok anak bangsa sendiri atau bangsa negara lain.

4. Memahami ideologi lain (*ruh at-tadayyun*).

Menanamkan kesadaran pada diri sendiri bahwa setiap manusia mempunyai ideologi yang tidak harus sama dengan ideologi kita. Di tengah keragaman ideologi, yang paling ideal adalah memahami substansi ideologi sebagai sebuah ajaran yang mencita-citakan kedamaian.

Empat langkah tersebut merupakan tahapan upaya berdemokrasi secara sehat dan baik. Dengan demikian, pada tahap ideal akan terbentuk sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Maka, perjuangan yang meletakkan "nilai-nilai" di atas sebagai dasar perjuangan akan melahirkan sebuah iklim demokrasi yang ideal, yaitu terciptanya sebuah bangsa yang menempatkan hakikat kemanusiaan di atas segala-galanya. Sebagaimana firman Allah: (QS Yunus [10]: 19) "Tidaklah manusia diciptakan kecuali sebagai umat yang satu".

B. Angin Reformasi dan Peran Strategis Umat Islam

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari- pada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan (selalu mengibarkan bendera "ishlah" atau reformasi). (QS Hud [11]: 116- 117).¹¹

Sebutan "reformasi"¹² kini telah beralih menjadi mainstream perjuangan kelompok anti-kemapanan di muka Bumi Pertiwi ini semenjak 1990-an. Pada mulanya, orang-orang yang sering mengangkat isu "reformasi" ini akan dituding oleh penguasa sebagai "musuh" pemerintahan. Mereka dengan mudah akan disebut berbuat makar. Sikap kritis mereka atas penyimpangan kebijakan para penyelenggara negara dianggap melawan negara. Aktivitas ini semakin melebar saat Pemilu 1997, yang ketika itu kelompok status quo masih menginginkan singgasananya tak tergoyahkan. Sejak kemunculan krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi pada 1997 hingga awal 1998, kepercayaan masyarakat dan politik kian menguatkan kebenaran nilai-nilai yang diperjuangkan kaum reformis. Rakyat yang semula bersikap masa bodoh, karena ekonominya tercabik-cabik, dan kemiskinan yang semakin meningkat, kemudian tergerak untuk mendukung gerakan reformasi daripada mengikuti segelintir penguasa yang menginjak-injak hak-hak rakyat.

Meskipun demikian, pengertian tentang "reformasi" di antara para aktivis tidaklah sama. Masih banyak ikhtilaf dan tasyabuh dalam memahaminya. Sebagian menganggap reformasi sudah tercapai kalau rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sudah jatuh. Lengsernya Soeharto pada Kamis 21 Mei 1998 dianggap puncak kemenangan reformasi. Namun, menurut sebagian yang lain, reformasi merupakan upaya pembersihan penyakit

¹¹ Potret Ibukota Kebudayaan Islam, <https://www.nu.or.id/warta/potret-ibukota-Kebudayaan-islam-laUIY>.

¹² Zakiyatus Soimah, *Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021.

KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) serta monopoli ekonomi dan sebagainya.¹³ Di sini, dalam pengertian ini, reformasi identik dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi juga diartikan perubahan semua sistem pemerintahan secara total. Mereka bersilang pendapat soal kapan reformasi direalisasikan secara utuh: apakah saat ini, besok, bulan depan, tahun depan, atau menunggu pensiun para pejabat?

Oleh karena itu, di sini perlu dipaparkan bagaimana pandangan Islam tentang reformasi itu sendiri, sebagai imbalan terhadap pandangan yang ada selama ini tentang kata yang banyak dipakai hingga kini itu. Dalam bahasa Arab, reformasi berarti *ishlah*, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, atau mengganti sesuatu yang usang dan rusak. Dalam Al-Quran, terma *ishlah*, dengan akar katanya *ashlah-yushlihu*, dipakai sebanyak 41 kali. Misalnya, dalam (QS Al-Ma'idah [5]: 39)

“Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya.”¹⁴

“Maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan (berbuat *ishlah*), tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS Al-A'raf [7]: 35)”¹⁵

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah kamu meng-*ishlah*-nya. (QS Al-A'raf [7]: 56) (24).”¹⁶

Sifat "reformatif" dalam Islam ini juga, secara filosofis, merupakan bagian dari proses emanasi (*al-faid*) Zat Allah Swt. Yang Mahahidup (*al-Hayy*) dan Menghidupkan (*al-Muhy*). Dengan demikian, dalam pengertian ini, menegaskan "reformasi" berarti menafikan salah satu sifat-Nya, dan hal itu jelas mustahil. Ini ditunjukkan dalam proses alamiah pertumbuhan manusia yang merupakan salah satu bukti dari asma Allah yang agung tersebut. Dari sebetuk sperma dan ovum yang menyatu, lalu berubah menjadi segumpal darah; kemudian menjadi janin, bayi, anak-anak, kanak-kanak, remaja, dan seterusnya. Dengan demikian, perubahan atau reformasi merupakan *sunnatullah* (hukum Allah), dan menolaknya ibarat menghentikan perputaran siang dan malam.

Dalam Islam, upaya reformasi senantiasa dianjurkan dan digelorakan dalam semua aspek kehidupan, sebagai ikhtiar menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam bidang akidah (keyakinan), Nabi Muhammad Saw. selalu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa memperbarui keimanannya: "Jaddidu imanakum bi-laa ilaha illallah" (Perbarui, segarkanlah, dan reformasikanlah keimanan kalian dengan kalimat La ilaha illallah). Dalam bidang syariat, terutama dalam relasi sosial hubungan kemasyarakatan, beliau juga sangat menganjurkan dan menekankan pentingnya "reformasi" tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan pasca-Nabi Saw. dalam berbagai disiplin ilmu naqliyah maupun aqliyah, serta munculnya para imam mazhab dan para fuqaha, merupakan salah

¹³ Adinda Afriyenti, Humaidi, Muammar Khadafi: *Kepemimpinannya Dari Awal Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Di Libya (1969-2011)*, Vol. 1 No.1 Maret 2019.

¹⁴ Anjar Sri Wahyuni, *Historitas Potret Islam Di Amerika*, Vol. 2 No. 1, Juli 2018.

¹⁵ Ali Romdhoni, *Kajian Islam Di Barat, (Sebuah Paparan Model Kajian dan Tokoh-Tokoh Orientalis)*, Volume I No. 1 April 2012.

¹⁶ Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'I fi-Islam* (Beirut: Darul Fikr, 1992).

satu bukti upaya "tajdid" (reformatif) dalam aspek syariat. Sedangkan dalam aspek akhlak dan tasawuf, tahapan-tahapan (atau magamat) dan ahwal spiritual yang dicapai seorang sufi dari masa ke masa memberikan suatu indikasi akan pentingnya reformasi jiwa pelaku tasawuf. "Tsaurah ruhiyah", evolusi spiritual, sering dilekatkan untuk dinamika ini. Kaum sufi setiap hari dituntut untuk bermuhasabah atau berintrospeksi atas semua akti- vitasnya selama 24 jam, untuk selalu mengoreksi diri serta memperbaiki dan mereformasinya. Tidak ayal, ada seorang tokoh sufi agung ber- nama Harits ibn Asad (w. 243 H) yang dijuluki "Al-Muhasibi", yang berarti orang yang senantiasa melakukan introspeksi diri.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika dari gerakan mistik Islam ini, dalam sejarah, berbagai revolusi agung bermunculan. Seperti yang dilakukan kelompok Tarekat as-Sanusiyah yang mampu meng- gulingkan kolonialisme Italia di Libia.¹⁷ Demikian pula gerakan Tarekat al-Mahdiah di Sudan yang mampu mengusir kolonialisme Inggris. Tarekat Shafawiyah pun mampu mendirikan dinasti di Persia. Para Wali Songo di Jawa juga mampu menggeser peran Kerajaan Majapahit dan Padja- djaran. Demikian pula peran para kiai dan guru-guru tarekat yang ber-juang mengusir penjajah Belanda dari Nusantara.¹⁸

Di samping itu, gerakan reformasi juga merupakan salah satu mani- festasi wujud amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan dalam Al- Quran. Namun, aplikasinya tentu tidak bisa dilakukan secara gegabah dan inkonstitusional. Upaya amar ma'ruf nahi mungkar haruslah dilak- sanakan secara tulus dan dilandasi niat yang bersih, serta tidak di- kotori oleh perbuatan kemungkaran lain. Jadi, tidak seperti yang banyak dilakukan kelompok-kelompok Islam tertentu di Jakarta yang merusak tempat-tempat tertentu atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kemungkaran terjadi dalam melaksanakan tugas suci tersebut, hal itu justru akan memperpanjang persoalan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, tidak ada kata berhenti bagi reformasi. Reformasi hakiki tidak hanya dilakukan untuk melengserkan rezim Orde Baru, sementara pada saat rezim tersebut berkuasa, kita justru banyak menikmati dan memuji-mujinya. Singkatnya, Islam pada hakikatnya adalah reformasi¹⁹ kehidupan sepanjang masa.

Dengan demikian, reformasi tidak hanya sebatas mengganti presiden, perombakan kabinet, atau digelarnya Sidang Istimewa MPR. Esensi reformasi adalah perubahan dan perbaikan secara totalitas atas segenap sistem politik, sistem sosial, hukum, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perubahan dan perbaikan tersebut dilakukan secara evolutif, dengan senantiasa bersandar pada konsepsi keislaman al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wal-akhdz bil-jadid al-ashlah, yaitu memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Ishlah atau reformasi juga tidak diproyeksikan sebagai ajang perebutan jabatan yang menghalalkan semua cara. Reformasi dalam Islam berlangsung secara istimrar, kontinu,

¹⁷ Al-Buthi, *Muhammad Sa'id Ramadhan, Al-Insan wa 'Adalatullahi fil Ardl (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 1987).*

¹⁸ As-Salafiyah: *Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madzhabun Islami (Beirut: Darul-Fikr Al-Mu'ashir, 1990).*

¹⁹ Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1990), cet. V.*

dari hari ke hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik-selama hayat masih dikandung badan.

C. Politisasi Agama dan Sekularisasi Agama: Agama sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi

Sampai saat ini, sebagian besar manusia meyakini bahwa kehidupan dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan manusia berstatus makhluk ciptaan, sebagai objek, yang dituntut untuk melakukan penghambaan kepada-Nya, sekaligus berperan sebagai subjek dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dua fungsi manusia ini secara tidak langsung merupakan instrumen manusia untuk tetap berotasi dalam bingkai keilahian. Dalam konteks ini, manusia membutuhkan agama sebagai sesuatu yang orisinal dari Tuhan. Agama adalah wahyu Tuhan yang konsepsinya dapat diyakini dan dijalankan melalui kitab suci. Jadi, Tuhan yang abstrak dapat terpotret secara nyata ketika manusia mampu mengimplementasikan ajaran agama dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman atas agama tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan pendapat yang mengatakan bahwa agama datang dari masyarakat itu sendiri.

Kitab suci suatu agama adalah wahyu Tuhan yang bersifat sakral yang diperuntukkan bagi manusia. Meskipun dalam agama itu terdapat unsur kesakralan, dalam praktiknya harus berdampak sosial. Ucapan syahadah (persaksian) dalam Islam, misalnya, mengandung spirit pembebasan manusia dari segala bentuk peminggiran, marginalisasi, keter-tindasan, diskriminasi yang diciptakan oleh konstruk sosial tertentu. Konsep zakat juga dapat mendorong kemunculan solidaritas sosial ditengah masyarakat sehingga mewujudkan gerakan masyarakat menuju tata kehidupan yang berkeadilan dan pemerataan kemakmuran. Dalam konteks inilah, masyarakat Barat sering keliru dalam menempatkan kesakralan agama. Kesakralan agama sering dicurigai dan dimaknai sebagai unsur yang menghambat kemajuan peradaban manusia. Kondisi manusia yang jumud dan terbelakang juga ditafsirkan sebagai implikasi dari doktrin agama yang normatif dan spekulatif.

Selain berdimensi ritual dan sakral, agama juga berdimensi peradaban (tsaqafah dan tamaddun). Maksudnya, nilai agama sebagai landasan manusia untuk melakukan kreasi-kreasi dan inovasi dalam kehidupannya. Kreasi (al-ibda bil-jadid) dan inovasi (al-akhzdu bil-jadid yang berlandaskan agama akan melahirkan sebuah peradaban yang luhur. Pada dimensi ini, agama melihat nilai-nilai kemanusiaan, misalnya "kedamaian", tidak hanya sebatas suasana yang tampak di permukaan, tetapi juga "kedamaian" sebagai simbol bagi kebenaran-kebenaran transenden tertentu.

Pada tataran empirik, penemuan partikel-partikel atom atau tenaga nuklir, misalnya, tidak akan diorientasikan untuk membunuh manusia, tetapi untuk membangun peradaban manusia, seperti untuk pembangunan tenaga listrik. Jadi, penelitian-penelitian keilmuan tidak akan diproyeksikan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk memakmurkan manusia. Kesakralan agama yang berdimensi akidah, ibadah, tsaqafah, dan tamaddun adalah sebuah penegasan tentang Islam sebagai landasan kehidupan manusia yang tidak hanya sebatas koleksi praktik-praktik ritual yang diterima dan konvensional. Singkatnya, sebagai wahyu Tuhan, sakralitas agama adalah sebuah kemutlakan.

Persoalan krusial yang dihadapi manusia sekarang ini, khususnya bangsa kita, adalah pembelokan fungsi agama itu sendiri sehingga berdampak merugikan umat manusia.

Di antaranya politisasi agama yakni hal-hal yang bersifat sosial-politik dibungkus dengan baju agama untuk mendapatkan legitimasi agama. Jadi, politisasi agama berarti melakukan segala aktivitas dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakannya dengan legitimasi agama.²⁰

Proses politisasi agama secara otomatis menimbulkan proses desakralisasi agama itu sendiri hingga ke titik nadir. Desakralisasi agama semacam ini sangat berpotensi menimbulkan sisi negatif bagi masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Hal ini pernah terjadi pada dekade 1930 dan 1950 ketika terjadi peristiwa-peristiwa besar di dunia: depresi di bidang ekonomi, perjuangan kelas, kemunculan fasisme, imperialisme rasial, dua perang dunia yang membawa kehancuran, serta pembunuhan sistemik di kamp-kamp konsentrasi. Rentetan peristiwa ini kemudian memunculkan frustrasi tersendiri di kalangan masyarakat Barat hingga mematikan harapan-harapan agung, pikiran-pikiran surgawi, dan juga ideologi. Sampai-sampai mereka pun meyakini bahwa ideologi telah mati.

Sedangkan dalam ranah Dunia Islam, politisasi agama juga merefleksikan sejarah kalam peradaban manusia. Potret seperti itu dapat dilihat pada peristiwa eksekusi mati sufi besar Al-Hallaj, genocide yang dialami sekte Syi'ah pada masa kekuasaan Bani Umayyah, hingga pembumihangusan ajaran Mu'tazilah di akhir pemerintahan Dinasti Abbasiyyah.²¹

Politisasi agama berarti menempatkan agama sebagai alat legitimasi. Dalam hal ini, ada keterlibatan dua unsur yang mempunyai posisi berbeda: politik (kepentingan) dan agama. Relasinya secara apik dapat dilihat dalam kaidah yang sering diperdengarkan oleh kalangan pesantren, "ma la yatimmu-l-wajibu illa bihi fahuwa wajibun". Maksudnya, jika idealisasi sebuah obsesi (al-wajib) bisa tercapai dengan melibatkan unsur lain, keterlibatan "unsur lain" itu pun menjadi keharusan. Masalahnya kemudian, politisasi agama itu menempatkan agama sebagai "unsur lain" yang bersifat instrumental, yakni untuk kepentingan melegitimasi kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, kelompok politik yang menggunakan legitimasi agama secara faktual memasukkan sentimen agama ke dalam arena kontestasi berkenaan dengan masalah-masalah riil kehidupan manusia-sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya. Dalam konteks ini, agama tidak menjadi landasan bertindak, tetapi sebagai alat justifikasi kepentingan. Dengan kata lain, agama sebagai aspirasi, bukan inspirasi. Itulah masalah yang krusial.

Oleh karena itu, proyek besar umat beragama sekarang ini adalah bagaimana menempatkan sakralitas agama ini di tengah komunitas beragama (religious community) hingga memberikan dampak sosial dan budaya. Dan bukan sebaliknya, malah memisahkan agama dari kesakralannya untuk kemudian memasuki periode "manusia pasca-agama" yang dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai jembatan menuju pencerahan!

Sakralitas agama bukanlah realitas yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan sebuah kehidupan sosial budaya yang maju. Agama yang telah terpinggirkan perlu ditarik kembali ke tengah dan bergerak di pusat sosial budaya. Jika beberapa kalangan

²⁰ Farrukh, Umar, *Tajdid fil Muslimin, la fil Islam* (Beirut: Darul Kitab Al-'Arabi, 1981).

²¹ Haris, Syamsuddin, "Genealogi Gagasan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Analisis CSIS*, tahun XXIV, no. 2, Maret-April 1995.

menempatkan agama sebagai bagian kehidupan sosial, yang perlu kita kembangkan adalah menjadikan agama sebagai landasan kehidupan sosial kemasyarakatan itu sendiri.

D. Islam, Demonstrasi, dan Negara: Bentuk Peran Strategis

Rasanya hampir setiap hari kita menyaksikan baik melalui media cetak maupun elektronik bertubarannya aksi massa dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, dan bahkan kerusuhan. Hal ini banyak dimotivasi oleh berbagai faktor, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Aksi demo dan unjuk rasa ini memang tak akan bisa dihentikan atau diberangus secara membabi buta mengingat kondisi keadilan belum tertunaikan secara memadai. Dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi adalah wajar dan bahkan bisa menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa demonstrasi akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab, tarik-menarik kepentingan- betapun kepentingan itu sudah dianggap paling ideal- akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping juga, demonstrasi bisa menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.

Bagaimana sebenarnya hukum Islam melihat aksi-aksi demonstrasi itu? Apakah hukum Islam menjustifikasi aksi tersebut? Lalu, bagaimanakah jika aksi-aksi tersebut didasari oleh keinginan untuk menegakkan keadilan dan untuk menuntut distribusi kesejahteraan yang merata? Dalam kaitan ini, kita perlu berangkat dari bagaimana Islam memandang negara. Menyitir pendapat Al-Ghazali, negara akan eksis dengan fondasi agama, dan agama akan jaya apabila ditopang oleh negara. Ungkapan ini adalah penggambaran relasi agama dan negara dalam satu simbiosis mutualis, dalam relasi yang saling menguntungkan.²² Sebab, negara dipandang sebagai jaminan bagi ketertiban pelaksanaan agama.

Akan tetapi, yang paling substansial dalam pandangan Islam adalah bahwa eksistensi negara mendapat pengabsahan sejauh ia menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Maka, dalam fiqh politik atau fiqh siyasah ditemukan satu doktrin yang menyatakan bahwa mendirikan negara baik secara syar'i maupun 'aqli merupakan fardhu kifayah. Dan, dalam rangka mewujudkan negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama itulah, hukum Islam tidak mengenal kekuasaan-tak-terbatas pemerintah. Hukum Islam memandang bahwa kekuasaan kepala negara harus dibatasi. Dari sini, ditetapkan kriteria yang sangat ketat untuk seorang kepala negara.

Pada intinya, ada beberapa prinsip yang ditetapkan oleh Islam yang membatasi kewenangan dan kekuasaan para penguasa, yaitu musyawara (syura), berbuat adil, persamaan di depan hukum (al-musawah amamal qanun), memelihara hak asasi manusia (al-muhafazhah 'ala karamati-l-insan), menjamin kemerdekaan rakyat dalam berakidah dan berpendapat (hurriyah al-'aqidah wa al-fikr wa al-qaud, serta kontrol dari rakyat dan pertanggungjawaban pemerintah (raqabatul ummah wa mas'uliyatu-l-hakim).

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum Islam, Dr. Wahbah Zuhaili, dalam karyanya yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (1989), kebebasan

²² Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushuli Al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 1956), *Al-Kharraji*, Abu Abbas Ahmad ibn Qasim, *'Uyun Al-Anba' fi Thabaqat Al-Athibba* (ed. Nizar Ridlo) (Beirut: Darul Maktab wal Hayah, t.t.).

berpendapat merupakan prinsip yang dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut seseorang untuk tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapa pun, meskipun menyangkut pemerintah. Ini yang pernah ditunjukkan oleh para sahabat. Sesuai dilantik sebagai khalifah, Umar ibn Al-Khaththab²³ berpidato di depan rakyatnya: "Rakyatku, siapa saja yang melihat ada yang menyimpang pada diriku, hendaknya kalian meluruskannya." Dengan serta-merta, Hudzaifah ibn Al-Yaman menimpali, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok dan menyimpang pada dirimu, maka aku sendiri yang akan meluruskannya dengan pedangku ini." Menanggapi orang ini, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ada orang di antara umat ini yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya."

Inilah prinsip utama yang secara efektif mampu membatasi kekuasaan pemerintahan menurut Islam. Selama pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip kebajikan, rakyat dituntut untuk taat pada pemerintah. Ada dua hak pemerintah ketika pemerintahannya dipandang absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Namun, jika pemerintah sudah menyimpang dari garis-garis ini, rakyat pun punya hak untuk mengontrol, mengoreksi, dan kalau perlu mengganti penguasa bersangkutan. Dalam hadis Nabi telah ditandaskan bahwa jihad yang paling afdhal adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim.

Lebih jauh lagi, seperti dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' Al-Jina'i fil-Islam* (1992), rakyat diperbolehkan untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng karena dianggap tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁴ Sampai pada titik ekstrem ini, hukum fiqih masih memberi pengabsahan. Ini semua karena besarnya semangat fiqih untuk menciptakan harmoni dan keadilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemerintah melindungi rakyat secara serius dan rakyat patuh terhadap pemerintah yang mengayomi mereka. Dengan demikian, tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.

Yang jelas, bagaimanapun, keadilan adalah satu prinsip yang harus dipegang oleh pemerintah mana pun. Jika prinsip ini diabaikan, hukum Islam akan bersuara, dan membolehkan tindakan koreksi kepada pemerintah untuk kembali menuntut keadilan. Namun, bukan berarti hukum Islam merestui tindakan demonstrasi yang menjurus pada tindakan destruktif dan anarkisme. Hukum Islam respek terhadap gerakan massa yang tidak merusak atau mudarat. Sebab, apa pun yang menimbulkan mudarat jelas tidak akan dibenarkan, meskipun tujuannya untuk menghilangkan kemudaratatan seperti penyelewengan dan ketidakadilan.

Berkaitan dengan soal ini, ada kaidah hukum fiqih yang menyatakan demikian: kemudaratatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratatan serupa (*adl-dlarar la yuzalu bi-dl-dlarar*). Yang ditoleransi oleh hukum fiqih adalah gerakan yang bertujuan menghilangkan kemunggaran (*al-munkarat* atau mengoreksi para penguasa yang keluar dari prinsip-prinsip pemerintahan, tanpa menimbulkan kerusakan. Justru ketika rakyat

²³ Niyazi, Abdul Karim Abdullah, *La'alli la Alqakum ba'da 'Ami Hadza: Hajjatul Wada' wa Khutbah Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam fiha* (Beirut: Markaz As-Shaf Al-Aliktruni, 1986).

²⁴ Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li-Ahkami-Qur'an* (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1954), 10 vol.

diam, pasrah terhadap nasib dan tidak berupaya men- dapatkan haknya dalam situasi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah, sikap rakyat ini yang perlu dipertanyakan. Mengutip Abu Dzar Al-Ghifari²⁵ yang pernah dengan lantang berkata: "Aku heran terhadap mereka yang masih ragu bahwa ketidakadilan perlu dikoreksi dan dilawan." Di sinilah pentingnya kita terus memonitor kebijakan pemerintah baru yang akan memulai langkahnya membangun peme- rintahan demi terciptanya cita-cita ideal yang telah sekian lama menjadi impian seluruh rakyat.

Kondisi Indonesia tersebut pada kenyataannya tidak dapat di- lepaskan dari komunitas umat Islam Indonesia. Di ribuan pulau yang berpenghuni dapat dipastikan terdapat umat Islam. Sepanjang pantai Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas umat Islam Indo- nesia. Begitu juga dengan laut dan hutan. Realitas ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi dan sta- bilitas keamanan, tidak dapat dilepaskan dari peran serta umat Islam.

Islam menegaskan bahwa ada korelasi yang cukup erat antara ekonomi dan keamanan. Pembangunan ekonomi tidak mungkin ter- capai sesuai target yang diharapkan jika mengabaikan stabilitas ke- amanan. Begitu juga stabilitas keamanan tidak mungkin dapat tercipta jika mengabaikan bidang ekonomi. Sebagaimana firman Allah, Maka beribadallah kalian kepada Tuhan Penguasa Ka'bah yang telah memberi mereka makan dari rasa lapar dan keamanan dari rasa takut (QS Al-Quraisy [106]: 3).²⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pertama, umat Islam sebagai makhluk Tuhan (fal ya'budu rabba hadza al-bait) dan kedua, umat Islam sebagai khalifatullah yang berperan sebagai pelaku ekonomi (ath'amahum min ju) dan aktor di balik stabilitas keamanan (wa amanahum min khawf. Jika diurai lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa manusia di muka bumi ini mempunyai peran ganda, sebagai makhluk Tuhan yang harus tunduk kepada supremasi hukum dan bertanggung jawab, serta sebagai khalifatullah yang harus menitik- beratkan upaya menciptakan kesejahteraan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya, kesejahteraan dan supremasi hukum adalah dua hal penting bagi kehidupan manusia di dunia. Allah berfirman: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang- orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS Al-Ma'idah [5]: 33).²⁷

Kesimpulan

Umat Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan tantangan zaman modern. Reformasi dipahami sebagai proses evolusi yang menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai tradisional yang baik sambil mengadopsi hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Politisasi agama diidentifikasi

²⁵ Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985).

²⁶ Siroj, Said Aqil, Shilatullahi bil Kauni: *Fi At-Tashawwufi Al-Falsafi* (diser- tasi doctoral, tidak diterbitkan) (Makkah: Umm Qura, 1994).

sebagai ancaman serius yang dapat merusak kesucian ajaran dan menimbulkan konflik sosial, sementara sekularisasi yang tidak tepat justru dapat mengikis peran agama dalam membangun etika publik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang bijak antara ajaran Islam dan dinamika modernitas untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Pendidikan agama yang benar dan inklusif menjadi kunci utama dalam membentuk pemahaman keislaman yang moderat, toleran, dan konstruktif bagi kemajuan umat dan bangsa. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran agama yang benar, serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, umat Islam dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Dzar al-Ghifari, <https://an-nur.ac.id/>, 16 November 2022.
- Adinda Afriyenti, Humaidi, Muammar Khadafi: Kepemimpinannya Dari Awal
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Al-Insan wa 'Adalatullahi fil Ardl* (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah, 1987).
- Al-Futuhatu Al-Makkiyyah (Kairo: Maktabah Ats-Tsaqafah Ad- Diniyah, t.t.), 4 vol.
- Ali Romdhoni, *Kajian Islam Di Barat*, (Sebuah Paparan Model Kajian dan Tokoh-Tokoh Orientalis), Volume I No. 1 April 2012.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami' li-Ahkami- -Qur'an* (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1954), 10 vol.
- Anjar Sri Wahyuni, *HISTORISITAS POTRET ISLAM DI AMERIKA*, Vol. 2 No. 1, Juli 2018.
- As-Salafiyah: Marhalah Zamaniyah Mubarakah la Madzhabun Islami (Beirut: Darul-Fikr Al-Mu'ashir, 1990).
- Audah, Abdul Qadir, *At- Tasyri' Al-Jina'I fi-Islam* (Beirut: Darul Fikr, 1992).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1989), cet. III, 8 vol.
- Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi. *Ar-Risalah/ Volume 20 nomor 1 Mei 2020* (Oleh Subehan Khalik) *Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1990, cet. V.
- Ekonomi-Mengungkap Korupsi, kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. M.Amin Rais. Penerbit Yogyakarta Aditya Media.1999. ISBN. 974-539-117-8.
- Farrukh, Umar, *Tajdid fil Muslimin, la fil Islam* (Beirut: Darul Kitab Al-'Arabi, 1981).
- Gifari Zakawali, *Mengenal Perang Jamal dan Perkembangan Sejarah Islam*, 2023.

- Haris, Syamsuddin, "Genealogi Gagasan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Analisis CSIS*, tahun XXIV, no. 2, Maret-April 1995.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikhu Al-Islam Al-Siyasiy wa Al-Dini wa Al- Tsaqafi wa Al-Ijtima'i* (Kairo: Maktabah Al-Nahdliyah Al-Mishriyah, 1968).
- Husain Taha, *Malapetaka Terbesar Dalam Sejarah Islam*, Jakarta : Pustaka Jaya., 1985.
- Ibn Al-'Arabi, Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah, *Qanun At-Ta'wil Beirut: Mu'assah Ulum Al-Qur'an*, 1986).
- Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Kairo: Dar Nahdlah Mishr, t.t.).
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa Huququ Al-Insan* (Kairo: Darul Syuruq, 1979).
- Islam and Lokal Wisdom, Religious Expression in Sootheast Asia (Supriyanto, Dkk). Cet April 2017.
- Islam Tuhan, Islam manusia. Haidar Bagir. Pengantar; Ahmad Syafi'I Ma'arif- Al- Mizan, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushuli Al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 1956), Al-Kharraji, Abu Abbas Ahmad ibn Qasim, 'Uyun Al-Anba' fi Thabaqat Al-Athibba (ed. Nizar Ridlo) (Beirut: Darul Maktab wal Hayah, t.t.).
- Kisah Perjuangan Reformasi, Editor. Selo Soemardjan Pustaka Smar Harapan-Cawang Jakarta -2023 ISBN 979-416-588-3.
- Konsistensi Pahalatul Ulama dalam Mempertahankan Pancasila dan kedaulatan Negara Kesatuan. *Jurnal UIN Wali Songo*. <http://journal.walisongo.ac.id.pdf.2019> UNiversitas Wali Songo Semarang Indonesia. Penulis: Amin Farih.
- Kudeta Tak Berdarah Hingga Revolusi Berdarah Di Libya (1969-2011), Vol. 1 No.1 Maret 2019.
- Madkur, Ibrahim, *Fil Falsafah Al-Islamiyah: Manhaj wa Tathbiq* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1993).
- Menegakkan Keberagaman dan Kemajemukan di Indonesia-, *Journal UWKS* <https://journal.uwks.ac.id.pdf> Oleh S. Marbun Thn 2023.
- Muhammad Dahlan, *Kontribusi Peradaban Islam terhadap Peradaban Barat; suatu Tinjauan Historis*, 2018.
- Muhammad Husain Haekal, (Biografi & Sejarah) Umar Bin Khattab, *Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2002.
- Niyazi, Abdul Karim Abdullah, *La'alli la Alqakum ba'da 'Ami Hadza: Hajjatul Wada' wa Khutbah Ar-Rasul Shallallahu alaih wasallam fiha* (Beirut: Markaz As-Shaf Al-Aliktruni, 1986).
- Piagam Madinah, *Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Zuhairi Nisrawi Thn 2009.

- Potret Ibukota Kebudayaan Islam, <https://www.nu.or.id/warta/potret-ibukota-Kebudayaan-islam-laUIY>.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985).
- Revolusi Prancis; Sebuah Pengantar Singkat, Penulis: William doyle- Penerbit : Basa-Basi ISBN. 978-623-305-241-2 Thn 2021.
- Reza Kurnia Darmawan/kompas, *Sejarah Kerajaan Majapahit: Awal Mula Berdiri hingga Keruntuhan, 2022*.
- Saqifah Bani Sa'idah, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Saqifah_Bani_Sa%27idah.
- Sardar, Ziauddin, *Tantangan Dunia Islam Abad XXI* (terj. A.E. Priyonodan Ilyas Hasan) (Bandung: Mizan, 1988).
- Siroj, Said Aqil, *Shilatullahi bil Kauni: Fi At-Tashawwufi Al-Falsafi* (diser-tasi doctoral, tidak diterbitkan) (Makkah: Umm Qura, 1994).
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Studi Islam di Barat: Cita, Fakta, Ciri dan Cara. <https://staiindojkt.ac.id/blog/2019/09/05/studi-islam-di-barat-cita-fakta-ciri-dan-cara/>.
- Syeikh Mohd Iqbal, *Misi Islam, The Mission Of Islam*, Penerbit Gunung Jati. Jakarta 1982.
- Tarikh Khulafa-Syarah Para Khalifah-Imam as-Suyuthi-Qisthi Press
- Zakiyatus Soimah, *Pemikiran Imam al-Ghazali Tentang Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021.